

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masjid, dalam sejarah dan tradisi Islam, selalu memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan umat Islam. Lebih dari sekadar tempat ibadah, masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan dakwah, serta menjadi titik pertemuan bagi komunitas Muslim dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan keagamaan dan sosial mereka. Di zaman Rasulullah SAW, masjid tidak hanya menjadi tempat untuk menunaikan shalat, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan perencanaan sosial. Fungsi multifaset ini menunjukkan betapa pentingnya peran masjid dalam mengikat dan membangun komunitas Muslim.

Memasuki era modern, peran masjid menjadi semakin kompleks. Kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan meningkatnya kebutuhan spiritual serta intelektual umat Islam menuntut masjid untuk beradaptasi dengan cepat. Masjid tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat edukasi, pemberdayaan sosial, serta pengembangan keilmuan Islam yang harus responsif terhadap perubahan zaman. Masjid-masjid kini diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan baru, seperti meningkatnya kebutuhan akan program-program dakwah yang lebih relevan dan dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat, termasuk generasi muda yang cenderung lebih tertarik pada pendekatan yang inovatif dan interaktif.

Di Indonesia, Masjid Pusdai (Pusat Dakwah Islam) Jawa Barat merupakan salah satu masjid besar yang memiliki peran penting dalam mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai keislaman di provinsi tersebut. Sebagai pusat kegiatan keagamaan, Masjid Pusdai bukan hanya tempat untuk menunaikan ibadah wajib, tetapi juga menjadi episentrum berbagai kegiatan dakwah, pendidikan, dan sosial yang bertujuan untuk memperkuat iman dan takwa umat Islam. Masjid ini telah menjadi simbol dan benteng keagamaan di Jawa Barat, di mana berbagai program dakwah dan pendidikan keislaman terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan intelektual masyarakat yang semakin beragam.

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya penekanan yang mendalam dalam program dakwah terhadap kelima Rukun Islam secara sistematis dan komprehensif. Dalam beberapa kasus, dakwah yang dilakukan di masjid cenderung bersifat umum dan tidak terfokus pada rukun-rukun dasar ini, sehingga pemahaman jamaah mengenai esensi serta kewajiban menjalankan Rukun Islam sering kali masih dangkal. Misalnya, syahadat sebagai dasar keimanan tidak selalu diperdalam pemahamannya, shalat berjamaah sering kali tidak terintegrasi dengan pembinaan spiritual yang konsisten, atau zakat yang hanya ditekankan pada momen-momen tertentu seperti menjelang bulan Ramadhan tanpa penguatan berkelanjutan mengenai pentingnya zakat sebagai bagian dari pembersihan harta.

Selain itu, kebijakan DKM dalam mengelola program dakwah sering kali tidak cukup adaptif terhadap kebutuhan jamaah, terutama dalam konteks

pengajaran yang relevan dengan kehidupan modern. Dalam era globalisasi ini, tantangan baru muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat, yang membuat dakwah tentang pelaksanaan Rukun Islam memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kondisi jamaah. Program dakwah yang menggunakan pendekatan konvensional terkadang kurang efektif dalam mengajarkan Rukun Islam kepada generasi muda yang lebih tertarik pada media digital atau teknologi modern sebagai sarana belajar.

Di balik setiap program dakwah yang sukses, terdapat peran krusial Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan mengimplementasikan kebijakan yang relevan dan efektif. DKM Masjid Pusdai, dalam hal ini, memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa masjid mampu menjalankan fungsinya sebagai pusat pengembangan keagamaan yang dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan umat. Kebijakan yang diambil oleh DKM meliputi berbagai aspek, termasuk pemilihan materi dakwah yang sesuai dengan konteks zaman, metode penyampaian yang mampu menjangkau semua kalangan, serta pengelolaan sumber daya manusia dan finansial yang efektif.

Namun demikian, tugas DKM dalam mengelola program dakwah di Masjid Pusdai bukanlah hal yang mudah. Tantangan besar datang dari perubahan sosial yang cepat dan perkembangan teknologi yang terus bergerak maju. Teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan mengakses informasi keagamaan. Generasi muda, misalnya, cenderung lebih menyukai konten dakwah yang dikemas dalam format digital

yang menarik, seperti video, podcast, atau media interaktif lainnya. Hal ini memaksa DKM untuk terus berinovasi dalam menyelenggarakan dakwah agar tetap relevan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin jarang datang ke masjid tetapi aktif di dunia digital.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan yang perlu diatasi oleh DKM. Meskipun Masjid Pusdai memiliki reputasi yang baik, namun seperti banyak masjid lainnya, tantangan pendanaan dan keterbatasan tenaga dakwah yang berkualitas menjadi isu yang harus ditangani dengan serius. Ketersediaan dana yang cukup sangat diperlukan untuk mendukung program-program dakwah yang inovatif dan berkualitas, sementara kebutuhan akan tenaga dakwah yang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam serta kemampuan komunikasi yang baik menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan program dakwah dapat tersampaikan dengan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh DKM Masjid Pusdai dalam upaya meningkatkan efektivitas program dakwah. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan menggali bagaimana DKM merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan tersebut dalam konteks tantangan yang dihadapi. Melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi yang digunakan oleh DKM dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada serta upaya-upaya inovatif yang telah dilakukan untuk meningkatkan program dakwah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses pembuatan kebijakan DKM dalam meningkatkan program dakwah di masjid PUSDAI?
2. Bagaimana implementasi kebijakan dakwah DKM dalam program dakwah di masjid PUSDAI?
3. Bagaimana evaluasi kebijakan dakwah DKM dalam program dakwah di masjid PUSDAI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan dakwah DKM dalam meningkatkan program dakwah di masjid PUSDAI.
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan dakwah DKM dalam program dakwah di masjid PUSDAI.
3. Untuk mengetahui hasil evaluasi dari kebijakan dakwah DKM dalam program dakwah di masjid PUSDAI.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Bermanfaat secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi terhadap ilmuan baik mahasiswa atau dosen dalam pengembangan kajian keilmuan tentang kebijakan DKM dalam meningkatkan program dakwah

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua orang serta dapat memberikan suatu pemahaman dan keilmuan tentang penting fungsi kebijakan bagi jamaah dalam memakmurkan sebuah masjid.

E. Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh H. Mundiri fakultas Dakwah (2003), *Kebijakan Pemerintah Terhadap Dakwah Islam Dalam Hubungannya Dengan Konflik Islam Kristen Masa Orde Baru*, (Studi Analisis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kehidupan Beragama Bidang Dakwah Agama) laporan penelitian ini membahas tentang dampak keputusan itu dalam dakwah agama.
2. Skripsi yang disusun oleh Rahayu Bektu Karyawati (2004) *Siaran Dakwah Islam Di Radio Swadesi Delanggu Kabupaten Klaten* dalam skripsi ini menghasilkan, pelaksanaan siaran agama Islam yang dilakukan oleh radio ini menggunakan metode tidak langsung baik itu dakwah berbentuk monolog, interaktif seperti mutiara hikmah yang direkam terlebih dahulu sebelum melakukan siaran.
3. Pada Skripsi yang berjudul *Aktivitas Dakwah Ikatan Remaja Masjid Jami' Assa'adah Pangkalan Jati Jakarta Timur* Skripsi ini disusun oleh mahasiswa yang bernama Hj. Zahratul Humaerah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008. Dalam skripsi tersebut dijelaskan

kegiatan ikatan remaja masjid di Tahun 2008, meliputi kegiatan dakwah bil-lisan, bil-qalam dan bil-hal yang terkait dalam faktor keberhasilan remaja dan aktivitasnya

4. Jurnal ini berjudul "*Dinamika Pembentukan Kebijakan Melalui Metode Dakwah Pada Kajian Kepemimpinan Nabi Muhammad Saw: Studi Literatur*" Yang disusun oleh Nurdalipah Hasugian, Abdul Mukti, dan Zaini Dahlan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2022. Pada jurnal ini membahas tentang kebijakan metode dakwah pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, dimana waktu itu dakwah nabi banyak ditolak oleh orang-orang bahkan orang yang mendengarkan dakwah nabi selalu merasa ingin menggagalkan dakwahnya tersebut. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu literature review. Berbeda halnya dengan penelitian yang saya angkat yaitu mengenai kebijakan dakwah DKM Pusdai Jawa Barat yang terfokus pada program dakwah
5. Jurnal ini berjudul "*Pesan Dakwah Dalam Kebijakan Pariwisata Halal Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat*" Yang disusun oleh Agung Wirawan mahasiswa Pascasarjana UIN Mataram pada tahun 2021. Pada jurnal ini membahas mengenai pesan dakwah dalam kebijakan pariwisata halal di NTB yang didalamnya menjelaskan bagaimana pesan dakwah yang terkandung dalam kebijakan pariwisata halal ini berupa materi akidah, syari'ah, muamalah dan juga akhlak. Teknik pengumpulan data pada jurnal ini yaitu dengan teknik observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode penelitian pada jurnal ini yaitu metode kualitatif, dalam penulisan maupun penyajiannya menggunakan kajian deksriptif untuk mengungkapkan isi jurnal ini. Berbeda halnya dengan penelitian yang saya ambil yaitu mengenai kebijakan dakwah di Masjid Pusdai Jawa Barat.

Penelitian yang penyusun lakukan disini lebih berfokus kepada kebijakan dakwah yang di lakukan DKM PUSDAI dalam meningkatkan program dakwah

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan juga sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1984) umumnya mengklasifikasikan kebijakan menjadi tiga tahapan: 1) Proses pembuatan kebijakan, yaitu kegiatan yang mencakup perumusan hingga

terbentuknya kebijakan; 2) Proses implementasi, yaitu pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan; 3) Proses evaluasi kebijakan, yaitu pengkajian kembali terhadap implementasi yang telah dilakukan, atau dengan kata lain, mencari tahu apa yang terjadi akibat dari pelaksanaan kebijakan tertentu serta membandingkan metode yang digunakan dengan hasil yang diperoleh (Jauhariyah & Syafa'at, 2021).

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (*intended*) atau dampak yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*).

Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu. Jann & Wegrich (2007) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut:

- a. Spesifikasi rincian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan;

- b. Alokasi sumber daya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
- c. Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William N. Dunn, (2003) adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategi dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih dari pada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering di sebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian di cari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi/Legitimasi

Kebijakan tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dimana melalui proses ini, warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

e. Evaluasi

Kebijakan/Penilaian Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan (Fika et al., 2023).

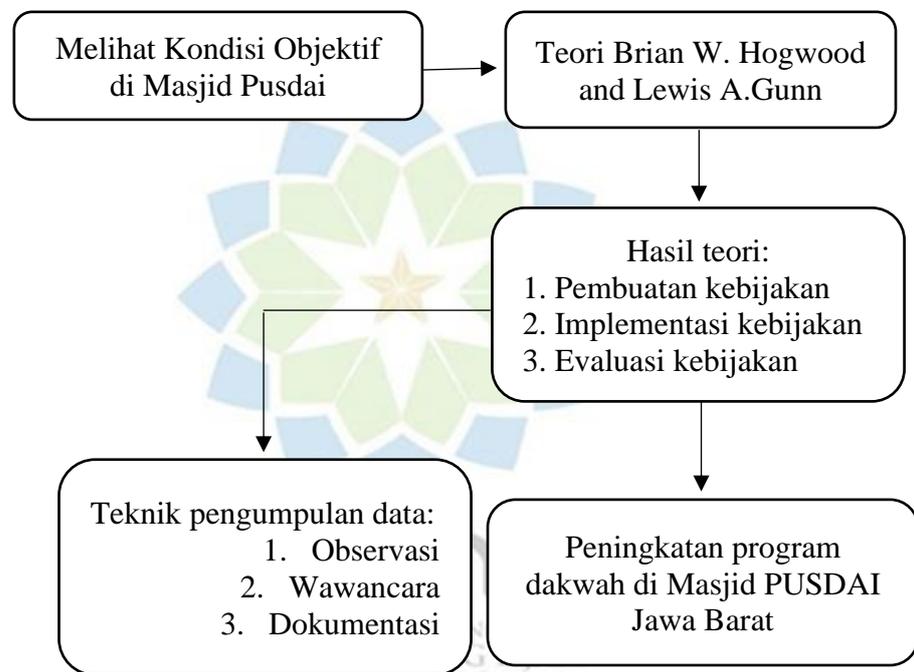
2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual kebijakan dakwah mencakup sejumlah prinsip dan asas dasar yang menjadi dasar pembentukan dan implementasi kebijakan tersebut.

Teori yang saya gunakan yaitu Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1984) umumnya mengklasifikasikan kebijakan menjadi tiga tahapan: 1) Proses pembuatan kebijakan, yaitu kegiatan yang mencakup perumusan hingga terbentuknya kebijakan; 2) Proses implementasi, yaitu pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan; 3) Proses evaluasi kebijakan, yaitu pengkajian kembali terhadap implementasi yang telah dilakukan, atau dengan kata lain, mencari tahu apa yang terjadi akibat

dari pelaksanaan kebijakan tertentu serta membandingkan metode yang digunakan dengan hasil yang diperoleh

Teknik pengumpulan menggunakan tiga 3 yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi menurut penlis cara ini efektif dan efisien untuk mendapatkan data akurat yang akan diteliti bertujuan dalam fungsi manajemen pelayanan jamaah masjid pusdai.



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: Observasi Penelitian

G. Langkah-langkah penelitian

1. Lokasi Penelitian

Masjid Pusdai adalah salah satu Islamic Centre yang berada di pusat Kota Bandung. Alasan memilih lokasi ini karena sebelumnya belum pernah ada yang meneliti mengenai permasalahan yang ada di Masjid Pusdai tersebut, serta lokasi yang terjangkau dan tempat tinggal

peneliti sehingga mempermudah dalam pengumpulan data yang diperlukan oleh peneliti.

2. Paradigma dan Pendekatan

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis atas “socially meaningful action” melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam setting yang alamiah, agar dapat memahami dan menafsirkan bagaimana aktor sosial mencipta dan memelihara dunia sosial (Sugiyono, 2011).

Untuk pendekatan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang mana fokus riset ini adalah pemahaman dan penjelasan terkait kebijakan dakwah dkm pusdai dalam meningkatkan program dakwah

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar karena untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan data-data dan informasi tentang kebijakan Masjid Pusdai dalam meningkatkan program dakwah melalui observasi, wawancara dan studi keputusan yang menyeluruh terhadap objek penelitian. Kemudian data yang diperoleh dan terkumpul dianalisis.

4. Jenis Data

1. Jenis Data Tentang Pembuatan Kebijakan Dalam Meningkatkan Program Dakwah Di Masjid Pusdai Jawa Barat
2. Jenis Data Tentang Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Program Dakwah Di Masjid Pusdai Jawa Barat
3. Jenis Data Tentang Evaluasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Program Dakwah Di Masjid Pusdai Jawa Barat

5. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah informan yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Data primer pada penelitian ini adalah data utama yang diperlukan adalah data berupa wawancara dengan pengurus Komunitas pemuda pusdai dan pengurus masjid pusdai

b. Data Sekunder

Data skunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisis dan interprestasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Atau data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan observasi merupakan data sekunder. (Nabillah, 2020).

Sumber data sekunder berupa dokumen maupun artikel yang berasal dari berbagai media seperti koran, majalah, dan internet ataupun situs-situs lainnya yang berkenaan mengenai pemuda masjid pusdai, sehingga mendukung dan menjadi pelengkap dalam penelitian ini.

6. Teknik pengumpulan

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam melakukan wawancara ini peneliti mewawancrai pengurus masjid pusdai yaitu pa hendi sebagai manajer oprasional

masjid pusdai dan pa imron sebagai kordinator bidang idaroh yang mengurus kegiatan dakwah di masjid pusdai jawa barat

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi menurut Arikunto (2006:72) ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen dokumen. Pada pelaksanaannya data dokumentasi merupakan data sekunder yaitu data informasi yang terkait dengan masalah penelitian yang diperoleh dari buku, internet, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen yang terkait.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran terkait dokumen-dokumen yang terkait mengenai kebijakan yang di lakukan pusdai terhadap peningkatan program dakwah

c. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang di susun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang menggambarkan akan terjadi dalam penelitian ini metode observasi yang di lakukan sebagai berikut:

- 1) Mengamati kegiatan dakwah di masjid pusdai
- 2) Mengamati lokasi pemelitan
- 3) Melakukan wawancara kepada kordinator bidang daroh yang mengurus kegiatan dakwah
- 4) Melakukan wawancara kepada manajer oprasional masjid pusdai

7. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian- bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya. Analisis data juga merupakan proses pencarian dan pengaturan yang dilakukan secara sistematis hasil dari wawancara, catatan lapangan dan bahan materi yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Artinya teknik pengumpulan data dan analisis data dikerjakan secara bersamaan. (Nabillah, 2020)

Ada beberapa penjelasan mengenai Teknik cara analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengeksrakan data, dan juga transformasi dari data kasar yang muncul dari berbagai catatan yang tertulis saat dilakukannya penelitian dilapangan.

b. Display (Kategorisasi)

Suatu proses mengelompokan pada suatu analisis yang berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

c. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dari teknik analisis data dimana kesimpulan yang ditentukan ada atau tidaknya kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data bisa dihasilkan kesimpulan valid atau terpercaya.

